

ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL GOVERNANCE OF REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES IN ROAD CLEANLINESS MANAGEMENT AT THE ENVIRONMENTAL SERVICE OFFICE OF MADIUN CITY

Analisis Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Kebersihan Jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Agus Santoso^{1a}, (*)Harianto^{2b}, Agus Wiyaka^{3c}

¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Merdeka Madiun

^asusianaagus74@gmail.com

^bharianto@unmer-madiun.ac.id

^caguswiyaka@unmer-madiun.com

(*)Corresponding Author

susianaagus74@gmail.com

How to Cite: Agus Santoso, Harianto, Agus Wiyaka. (2026). Analisis Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Kebersihan Jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun doi: [10.36526/js.v3i2.8516](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.8516)

Received : 13-04-2026
Revised : 27-05-2026
Accepted : 28-06-2026

Keywords: Regional Government Organizational Governance, Road Cleanliness Management

Abstract. Studies on street cleanliness management generally focus on technical and operational aspects, while research examining the governance of regional government organizations in managing street cleanliness remains relatively limited, particularly within the context of municipal governments. This study aims to analyze the governance of regional government organizations in street cleanliness management implemented by the Environmental Agency of Madiun City. This study employed a qualitative approach with a descriptive research design. The informants consisted of several parties directly involved in the implementation of street cleanliness management, including the Head of the Madiun City Environmental Agency, the Head of the Sanitation and Waste Management Division, street cleaning personnel, and eight community members residing in areas where street cleanliness management is carried out. Data were collected through documentation and interviews. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results indicate that street cleanliness management in Madiun City has been implemented relatively well; however, improvements are still needed, particularly in terms of community participation and the equitable implementation of programs. These findings provide practical implications for local governments to strengthen collaboration with communities, enhance coordination among implementing units, and develop more participatory and sustainable street cleanliness management policies.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pelayanan di bidang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan perkotaan tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika kota, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan masyarakat, kenyamanan ruang publik, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola kebersihan lingkungan secara optimal melalui organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang tersebut (Mahpudin, 2024).

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014).

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan, permasalahan kebersihan lingkungan menjadi semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya volume sampah dan berbagai permasalahan kebersihan di ruang publik. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan kebersihan yang efektif, terencana, dan berkelanjutan agar lingkungan perkotaan tetap bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. (*Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2008).

Salah satu unsur penting dalam pengelolaan lingkungan perkotaan adalah kebersihan jalan sebagai bagian dari pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Jalan merupakan fasilitas umum dengan tingkat mobilitas dan aktivitas yang tinggi, sehingga kondisi kebersihannya menjadi perhatian utama dalam menciptakan lingkungan kota yang sehat, nyaman, dan tertata (Gonz' & Alez-Flores, 2025). Kebersihan jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika kota, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kebersihan yang efektif dan berkelanjutan. Jalan yang bersih dan bebas dari sampah dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, mendukung kesehatan lingkungan, serta memperkuat citra positif suatu kota di mata masyarakat maupun pendatang (Setiawan, 2024). Pemerintah daerah tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan komitmen kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan (Gina Rahmani dan Hardi Putra Wirawan, 2025).

Pengelolaan kebersihan jalan pada umumnya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas ini memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan kebersihan dan persampahan di wilayah perkotaan. Dalam menjalankan tugasnya, dinas tersebut harus mampu mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen yang mendukung pelaksanaan pelayanan kebersihan secara optimal. (*Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, 2012)

Dalam perspektif administrasi publik, kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola organisasi yang baik mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi antarunit kerja, sistem pengawasan, serta pelaksanaan program yang terencana dan terukur. Penerapan tata kelola yang efektif akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, organisasi publik dituntut mampu membangun sistem kerja yang profesional agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkualitas (Ardani, Fransisco, Febriyanti, Rizma, 2024).

Namun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan di daerah masih menghadapi beragam tantangan yang memengaruhi efektivitas pelayanan publik. Permasalahan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan fasilitas dan armada kebersihan, kurangnya sumber daya manusia yang menangani kebersihan, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di samping itu, lemahnya koordinasi antarbidang maupun antarinstansi pemerintah juga menjadi faktor yang menyebabkan pengelolaan kebersihan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya kualitas lingkungan perkotaan dan efektivitas tata kelola kebersihan daerah (Ogan et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengelolaan kebersihan lingkungan dan persampahan umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan, efektivitas pelayanan kebersihan, pengelolaan persampahan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Permasalahan utama pengelolaan kebersihan daerah berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program kebersihan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak menyoroti aspek operasional dan implementasi program kebersihan, sementara kajian yang secara khusus menganalisis tata kelola organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan kebersihan jalan masih relatif terbatas (Rahmadani & Sugiarto, 2023).

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan kebersihan lingkungan dan persampahan sebagai objek kajian secara umum, sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana struktur organisasi, pembagian kewenangan, koordinasi antarunit kerja, pengelolaan sumber daya, dan mekanisme pengawasan dalam organisasi perangkat daerah memengaruhi keberhasilan pengelolaan kebersihan jalan. Padahal, kebersihan jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki karakteristik berbeda karena berkaitan langsung dengan ruang publik yang digunakan masyarakat setiap hari dan memerlukan pengelolaan yang berkesinambungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan memfokuskan kajian pada tata kelola organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan kebersihan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebersihan jalan, tetapi juga menganalisis bagaimana tata kelola organisasi dijalankan melalui aspek koordinasi, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan tugas, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelayanan kebersihan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola organisasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan lingkungan perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis tata kelola organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan kebersihan jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses pengelolaan kebersihan jalan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, serta keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kebersihan.

Fokus penelitian mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan Sedarmayanti, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik (Sedarmayanti, 2020). Fokus tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji tata kelola organisasi dalam pengelolaan kebersihan jalan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebersihan jalan di wilayah Kota Madiun. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan program kebersihan jalan. Informan terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Kepala Bidang Kebersihan atau Persampahan, petugas kebersihan jalan, serta masyarakat yang berada di wilayah pengelolaan kebersihan jalan.

Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan kebersihan jalan dan kondisi lingkungan yang menjadi objek penelitian. Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan kebersihan jalan, mekanisme koordinasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data

melalui penelaahan dokumen perencanaan, laporan kegiatan, struktur organisasi, serta dokumen lain yang relevan.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang konsisten dan mampu menjelaskan tata kelola organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan kebersihan jalan di Kota Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perspektif administrasi publik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memiliki peran strategis dalam tata kelola organisasi perangkat daerah khususnya dalam pengelolaan kebersihan jalan sebagai bagian dari pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Pengelolaan kebersihan jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi Masyarakat, efektivitas dan efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan pelayanan kebersihan yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Transparansi

Transparansi dalam tata kelola organisasi perangkat daerah diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait program, kegiatan, serta capaian pengelolaan kebersihan jalan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi mengenai program kebersihan lingkungan, kegiatan sosialisasi, serta publikasi kegiatan melalui media informasi pemerintah daerah. Keterbukaan informasi tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi publik.

Meskipun demikian, transparansi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi mengenai program kebersihan maupun mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga kemampuan organisasi dalam memastikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mashudin yang menyatakan bahwa transparansi informasi publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan dan memperkuat legitimasi organisasi public (Mashudin, 2025).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Madiun telah melaksanakan mekanisme akuntabilitas melalui penyusunan laporan kinerja, evaluasi kegiatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program kebersihan jalan. Adanya pelaporan berkala menunjukkan komitmen organisasi dalam mempertanggungjawabkan capaian program kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Namun demikian, akuntabilitas tidak hanya diukur dari keberadaan laporan administratif, tetapi juga dari kemampuan organisasi menjelaskan hasil dan dampak program kepada masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui capaian program kebersihan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan akuntabilitas publik yang tidak hanya berorientasi pada pelaporan internal, tetapi juga pada penyampaian informasi hasil kinerja kepada masyarakat. Temuan ini mendukung penelitian Rumada yang menjelaskan bahwa

akuntabilitas publik akan berjalan optimal apabila organisasi mampu menghubungkan pelaporan kinerja dengan kebutuhan informasi Masyarakat (Rumada et al., 2025).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan kebersihan jalan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kota Madiun telah terlibat dalam berbagai kegiatan kebersihan lingkungan seperti kerja bakti, kegiatan bank sampah, dan program edukasi lingkungan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat belum merata pada seluruh wilayah. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti kesibukan masyarakat perkotaan, perubahan pola hidup yang semakin individualistis, serta persepsi bahwa kebersihan jalan merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Pada kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, masyarakat cenderung lebih fokus pada kegiatan ekonomi dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak semata-mata disebabkan kurangnya program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fatimah dan Jusniaty yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kebersihan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi Masyarakat (Fatimah & Jusniaty, 2022).

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH Kota Madiun telah mampu menjaga kebersihan sebagian besar ruas jalan utama melalui penempatan petugas kebersihan, pengaturan jadwal kerja, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa program kebersihan jalan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Namun demikian, efektivitas pelayanan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pelayanan, dan meningkatnya volume sampah akibat aktivitas masyarakat. Keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa titik jalan memerlukan penanganan yang lebih intensif. Dari sisi efisiensi, DLH dituntut mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan kebersihan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi dan pengelolaan operasional secara tepat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jumadi yang menyatakan bahwa efektivitas pelayanan kebersihan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya dan sistem operasional organisasi (Jumaidi, 2025).

Kepatuhan terhadap Peraturan (Supremasi Hukum)

Kepatuhan terhadap peraturan merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Dalam pengelolaan kebersihan jalan, DLH Kota Madiun melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, serta standar operasional prosedur yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan yang tertib, konsisten, dan memiliki kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan kebersihan jalan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau belum mematuhi aturan kebersihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan supremasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan aturan secara konsisten agar kepatuhan terhadap regulasi kebersihan dapat meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinaulan et al. (2025) yang menjelaskan bahwa penegakan aturan dan

kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan good governance pada organisasi public (Sinaulan et al., 2025).

Secara keseluruhan, peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam tata kelola organisasi perangkat daerah pada pengelolaan kebersihan jalan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan lingkungan kota yang bersih. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan partisipasi publik menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan tata kelola organisasi DLH dalam menjalankan fungsi pelayanan kebersihan perkotaan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Kebersihan/Persampahan, petugas kebersihan, serta masyarakat, pengelolaan kebersihan jalan di Kota Madiun dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan kebersihan jalan. Informasi mengenai program dan kegiatan disampaikan melalui berbagai media, seperti website, media sosial, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun demikian, transparansi yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, serta belum meratanya akses informasi di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam strategi komunikasi agar informasi dapat diterima dan dipahami secara lebih efektif oleh masyarakat.

Penelitian tentang *Good Environmental Governance* di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa transparansi dan akses informasi menjadi indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah perkotaan. Organisasi pemerintah yang terbuka dalam menyampaikan kebijakan dan pelaksanaan program kebersihan cenderung lebih mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang bersih dan berkelanjutan (Nugroho, 2023).

Akuntabilitas

Dari aspek akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup telah menunjukkan adanya sistem pertanggungjawaban yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya laporan kegiatan yang disusun secara berkala serta evaluasi terhadap pelaksanaan program. Pengawasan juga dilakukan secara berjenjang, baik secara internal maupun eksternal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan yang dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan.

Penelitian tentang kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa akuntabilitas kelembagaan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan kebersihan lingkungan. Organisasi publik yang memiliki sistem pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang baik cenderung lebih mampu menjaga kebersihan kota secara efektif dan berkelanjutan (Andini, 2025).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mendukung program kebersihan jalan tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengikuti kegiatan kerja bakti. Namun, tingkat partisipasi tersebut belum merata. Masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat.

Meskipun terdapat sebagian masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengikuti kegiatan kerja bakti, namun keterlibatan tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih ditemukan masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, yang ditandai dengan perilaku membuang sampah sembarangan serta kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan masih perlu ditingkatkan.

Kurangnya partisipasi masyarakat ini juga dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, kurangnya pemahaman, serta belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam bentuk edukasi, kampanye lingkungan, serta peningkatan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan jalan masih perlu ditingkatkan agar program kebersihan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Sylvina Rusadi dan Wahyu Setiawan (2021). Penelitian berjudul "*Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*". Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Rusadi, S., & Setiawan, 2021).

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas pengelolaan kebersihan jalan di Kota Madiun secara umum sudah cukup baik, terutama di wilayah pusat kota. Hal ini didukung oleh adanya perencanaan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta pelaksanaan kegiatan yang rutin. Namun, efektivitas tersebut belum merata di seluruh wilayah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain volume sampah yang tinggi dan perilaku masyarakat yang masih kurang disiplin. Dengan demikian, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas program secara menyeluruh.

Dalam hal efisiensi, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, seperti pengaturan jadwal kerja, optimalisasi rute petugas, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah petugas dan armada masih menjadi kendala dalam mencapai efisiensi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih baik serta inovasi dalam pelaksanaan program agar efisiensi dapat terus ditingkatkan. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki program pengelolaan sampah, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, kurang optimalnya koordinasi organisasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Penelitian lain oleh Satibi et al. (2025) juga menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan pelayanan kebersihan secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang efektif mampu mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kebersihan jalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup (Satibi et al., 2025)

Pelaksanaan program telah didukung oleh perencanaan yang cukup terstruktur, seperti penjadwalan kegiatan kebersihan, pembagian wilayah kerja petugas, serta adanya koordinasi antarpetugas di lapangan. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga turut mendukung tercapainya tujuan program. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah masih adanya titik-titik tertentu yang kurang terjangkau secara maksimal, tingginya volume sampah pada waktu tertentu, serta perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung kebersihan lingkungan. Hal ini menyebabkan hasil yang dicapai belum merata di seluruh wilayah Kota Madiun. Dengan demikian, meskipun program kebersihan jalan telah berjalan cukup efektif, masih diperlukan peningkatan dalam hal pemerataan pelayanan dan penguatan peran masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara menyeluruh.

Dari aspek efisiensi, pengelolaan kebersihan jalan di Kota Madiun telah dilakukan dengan berbagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengaturan jadwal kerja petugas, penentuan rute pembersihan yang lebih efektif, serta pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal. Selain itu, adanya sistem pelaporan dan monitoring dari petugas lapangan juga membantu dalam mengurangi pekerjaan yang tidak efektif serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menekan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan program.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat efisiensi, seperti keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah, keterbatasan petugas di lapangan, serta kondisi wilayah yang cukup luas. Faktor-faktor tersebut menyebabkan beberapa pekerjaan belum dapat dilakukan secara maksimal dan tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun efisiensi pengelolaan kebersihan jalan sudah cukup baik, masih diperlukan peningkatan dalam hal penambahan sumber daya, perbaikan sistem kerja, serta inovasi dalam pengelolaan operasional agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Kepatuhan terhadap Peraturan

Kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan kebersihan jalan menunjukkan hasil yang cukup baik dari sisi pelaksana, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan petugas kebersihan yang telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dari sisi masyarakat, kepatuhan masih belum optimal. Masih ditemukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan. Selain itu, penerapan sanksi yang belum maksimal juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan dalam penegakan peraturan serta sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan dapat lebih ditingkatkan.

Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap peraturan juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu masyarakat dalam memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun sudah terdapat aturan dan sanksi yang mengatur tentang kebersihan, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang terjadi akibat kebiasaan dan kurangnya kepedulian sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan saja tidak cukup, tetapi juga perlu didukung oleh edukasi yang berkelanjutan serta penguatan budaya disiplin lingkungan agar kepatuhan dapat meningkat secara konsisten.

Penelitian oleh Fadilah menunjukkan pengelolaan sampah belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Fadilah et al., 2025). Pengelolaan sampah yang baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Tanpa sistem pengelolaan yang memadai, sampah dapat menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga gangguan Kesehatan.

PENUTUP

Tata kelola organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan kebersihan jalan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun secara umum telah berjalan cukup baik dan mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Aspek transparansi telah diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai program dan kegiatan kebersihan kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas tercermin dari adanya mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, pengelolaan kebersihan jalan telah mampu menjaga kebersihan pada sebagian besar ruas jalan utama melalui pengaturan sumber daya manusia, jadwal kerja, dan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala berupa keterbatasan armada dan personel, belum meratanya kualitas pelayanan pada seluruh wilayah, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, meskipun kepatuhan terhadap peraturan telah diterapkan oleh pelaksana program, masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga memengaruhi keberhasilan pengelolaan kebersihan jalan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kebersihan jalan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas organisasi dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun perlu memperkuat strategi partisipatif melalui peningkatan edukasi lingkungan secara berkelanjutan, pengembangan kemitraan dengan komunitas dan lembaga masyarakat, optimalisasi media informasi publik, serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan kebersihan. Selain itu, peningkatan jumlah sarana dan prasarana kebersihan serta pemerataan pelayanan pada wilayah yang memiliki tingkat aktivitas tinggi juga perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan jalan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah dan berfokus pada pengelolaan kebersihan jalan di Kota Madiun, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi tata kelola kebersihan pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga temuan yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa daerah, mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau mengkaji pengaruh masing-masing indikator good governance terhadap efektivitas pengelolaan kebersihan jalan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Y. dan S. (2025). Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Dalam Implementasi Regulasi Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.46730/jiana.v23i3.8313>
- Ardani, Fransisco, Febriyanti, Rizma, dkk. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Baktijaya Kota Depok. *JEKMA : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2.1472>
- Fadilah, E. N., Nurwanda, A., & Suwarlan, E. (2025). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Dalam Pengelolaan Sampah*. 9(2), 210–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i2.596>
- Fatimah, S., & Jusniaty, J. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah*. 2(2), 238–251. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>
- Gina Rahmani dan Hardi Putra Wirawan. (2025). The Role of Local Government in Road Maintenance From the Perspective of Siyasa Tanfidziyah (A Study in Palembang Subdistrict, Agam Regency). *IJEIT*, 8(December), 81–93. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/IJEIT/article/view/13057>
- Gonz´, & Alez-Flores, M. O. (2025). *Exploring the interactions between society, wellbeing and urban spaces: An investigation of safety and morphological attributes focusing on human experiences*. 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wss.2025.100246>
- Jumaidi, R. (2025). *Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah*. 9(1), 109–126. <https://doi.org/https://10.25139/jmnegara.v9i1.10500>
- Mahpudin. (2024). *Encouraging Superior Performance of Village Government : The Strategic Role of Regional Autonomy in Realizing Quality Public Services in Lebak Regency*. 3(1), 55–63. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61391/sij.v3i1.124>
- Mashudin, A. (2025). Membangun Tata Kelola Sampah Yang Akuntabel Melalui Penerapan Good Governance Di Kota Medan. *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Bisnis Digital (RIGGS)*, 4(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3570>
- Nugroho, S. dan C. (2023). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(2).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56127/jekma.v3i2.1472>
- Ogan, P. T., District, O. I., & Fahlevi, A. H. (2024). *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in*. 2(4), 187–405. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (2012).
- Rahmadani, D., & Sugiarto, A. (2023). *Implementation of Environmental Cleanliness Program through the Role of the Community in Pematang Siantar City*. 4(3), 36–46. <https://doi.org/https://10.47667/ijpasr.v4i3.254>
- Rumada, W., Soselisa, P. S., & Waisapy, J. (2025). *Akuntabilitas Pelayanan Publik di Desa Administratif Kildor Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur*. 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i2.523>
- Rusadi, S., & Setiawan, W. (2021). (2021). Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 1–9. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 1–9., 7(1), 1–9. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).6446](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).6446)
- Satibi, I., Putri, N. A., Indriane, M., & Putri, F. N. (2025). *Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat*. 5, 1673–1681. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17634>
- Sedarmayanti. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan. Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, T. (2024). *Sustainable Urban Clean Water Governance in Indonesia: Problems, Institutions, and Future Solutions*. 3(02). [https://doi.org/10.59324/ejeba.2024.1\(3\).02](https://doi.org/10.59324/ejeba.2024.1(3).02)
- Shabilla, W., Ardani, T. W., Nurhaliza, S., Desambari, D. R., Adriyanasta, N., Amabel, M. L., Setiady, T., & Fadhilah, M. (2025). *Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran Lembaga Perbankan dalam Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Good Governance*. 2(November).
- Sinaulan, R. L., Angelina, M., Sinaulan, U., & Ismed, M. (2025). *Green Social : International Journal of Law and Civil Affairs The Role of the Community in Environmental Monitoring : A Legal Perspective*. <https://doi.org/https://doi.org/10.70062/greensocial.v2i2>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).